

### **BAB III**

## **BANTUAN INTERNASIONAL TERHADAP TANGGAP DARURAT**

### **BENCANA TSUNAMI ACEH**

Pasca tsunami Aceh, berbagai macam bantuan datang dari organisasi internasional dan negara, adapun bantuan yang berasal dari organisasi internasional ialah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *World Food Programme* (WFP), *International Rescue Committee* (IRC), *International Federations of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC) dan bantuan negara-negara asing seperti, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Switzerland, Singapura, China, dan negara lainnya. Secara umum, banyak bantuan internasional terkait bencana tsunami Aceh baik untuk mitigasi bencana, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun pada bab ini akan membahas peran lembaga internasional dan negara-negara asing dalam masa kedaruratan sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

#### **3.1 Peran Lembaga Internasional dalam Pemberian Bantuan Bencana Gempa-Tsunami Aceh**

Bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh-Nias pada tanggal 26 Desember 2004 merupakan bencana internasional. Bencana internasional adalah bencana yang dalam penanganannya melibatkan peran dari dunia internasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Perbedaan bencana lokal, nasional dan internasional terletak pada kemampuan pengelolaan bencana. Jika di tingkat lokal yang terdampak bencana mampu mengatasi segala permasalahan yang terjadi akibat bencana maka status bencana tersebut adalah bencana lokal. Lain lagi jika di tingkat lokal sudah tidak mampu lagi, maka pemda setempat biasanya menyatakan ketidak sanggupannya dan menaikkan status bencana tersebut menjadi bencana nasional yang kemudian direspon dan dibantu oleh pemerintahan pusat dan daerah lainnya. Bencana internasional adalah bencana yang tidak mampu lagi ditangani oleh sebuah negara, lalu pemerintahnya menyatakan

Penetapan status bencana yang terbuka untuk bantuan internasional merupakan sebuah cara dari negara untuk memperoleh bantuan internasional, yang menitik beratkan pada aspek resiliensi suatu wilayah, masyarakat dan pemerintah dalam penanganan bencana.

Indonesia mendapat simpati dan perhatian dunia sehingga negara-negara maupun organisasi internasional bergerak untuk memberikan bantuan dalam jumlah yang besar. Berbagai macam bantuan diberikan seperti, bantuan dana, bantuan pangan, sanitasi, *shelter*, transportasi udara, bantuan medis, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Bantuan internasional pun datang dengan berbagai bentuk mulai dari personil dan perlengkapan evakuasi, tim dan peralatan medis hingga militer. Maka dari itu, selanjutnya pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa kontribusi lembaga atau organisasi internasional yang memberikan bantuan pada masa tanggap darurat bencana gempa tsunami di Aceh tahun 2004.

### **3.1.1 *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)***

Pada tanggal 2 Januari 2005, UNHCR sebagai salah satu badan di bawah naungan PBB melakukan mobilisasi sumber daya untuk bisa masuk ke Indonesia dan memberikan bantuan kepada para korban tsunami.<sup>3</sup> Selain terlibat dalam fase tanggap darurat, UNHCR juga terlibat dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Tujuan utama UNHCR yang berkaitan dengan pemberian

---

bahwa negaranya terbuka untuk bantuan internasional. Hal ini secara lebih lanjut diatur dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang bencana.

<sup>2</sup> Sisira Jaya Suria dan Peter McCawley, 2010, *The Asian Tsunami: Aid and Reconstruction After a Disaster*, UK: Edward Elgar Publishing Limited, dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159342/adbi-asian-tsunami-aid-reconstruction.pdf>, diakses pada 12 Desember 08.07 WIB.

<sup>3</sup> UNHCR, *Looking for Beyond Emergency Relief in Aceh*, dalam <http://www.unhcr.org/news/latest/2005/1/41fa5fd94/looking-beyond-emergency-relief-aceh.html>, diakses pada 12 Desember 2017 07.02 WIB.

bantuan pada bencana tsunami Aceh ini yaitu, mendistribusikan bantuan darurat untuk menyelamatkan para korban, membantu pemulihan dan pemulihan dini bagi masyarakat serta menemukan solusi jangka panjang bagi mereka yang terkena dampak tsunami di provinsi NAD, termasuk di sepanjang pantai barat, dan Nias.<sup>4</sup>

UNHCR menyediakan bahan-bahan untuk membangun shelter dan bantuan non-pangan untuk sekitar 100.000 orang. Bantuan ini termasuk 16.000 tenda, hampir 100.000 selimut dan bantuan non-pangan lainnya.<sup>5</sup> Pendistribusian bantuan tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari tiga bulan dan melibatkan 65 tambahan staf internasional untuk periode satu bulan atau lebih.<sup>6</sup> Laporan keuangan dan daftar bantuan dari UNHCR saat tsunami Aceh lihat pada *lampiran 3*. Selanjutnya, UNHCR memberikan 450 ton bantuan non-pangan dan peralatan telekomunikasi yang diterbangkan dari Kopenhagen, Frankfurt, dan Dubai melalui lima penerbangan ke Jakarta dari 2 hingga 6 Januari 2005.<sup>7</sup> Namun, bantuan tersebut sempat terjebak di Jakarta selama 10 hari karena adanya kemacetan logistik dan belum bisa dikirimkan ke Aceh. Selama waktu itu, UNHCR tidak bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tsunami.

Upaya signifikan dilakukan oleh kantor pusat UNHCR dengan kantor cabang di Aceh untuk menyediakan tim lapangan beserta peralatan komunikasi dasar. Pengiriman peralatan komunikasi yang pertama yakni *IT Batch (VF/HF/Repeater)* pada tanggal 30 Desember 2004.<sup>8</sup> Fungsi dari alat ini adalah untuk alat telekomunikasi guna melancarkan pemberian bantuan dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Bobby Lambert, *UNHCR's Response to the Tsunami Emergency in Indonesia, and Srilanka December 2004-November 2006*, dalam [www.unhcr.org/afr/461504522.pdf](http://www.unhcr.org/afr/461504522.pdf), hal. 16, diakses pada 5 November 2017 14.08 WIB.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Bobby Lambert, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 37.

memudahkan koordinasi antar petugas UNHCR. Alat-alat tersebut didatangkan dari Denmark pada tanggal 4 Januari 2005, namun peralatan ini termasuk peralatan yang macet di pelabuhan Jakarta. Sebagai konsekuensinya, tim lapangan harus mengandalkan handset VHF yang dibawa dari Timor Leste dan tiba di Aceh pada tanggal 2 Januari 2005. UNHCR menemukan kendala dalam pengoperasian alat tersebut yakni Ponsel dan VHF tidak menyediakan jaringan komunikasi yang handal di lapangan, terutama di daerah terpencil seperti di Calang.<sup>9</sup>

### 3.1.2 *World Food Programme (WFP)*

WFP merupakan tim dari PBB yang pertama memasuki Banda Aceh. WFP merupakan lembaga PBB yang berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan, memerangi kelaparan di seluruh dunia dan perkembangan jangka panjang untuk program pangan serta bekerja dengan masyarakat untuk memperbaiki gizi dan ketahanan di negara-negara berkembang.<sup>10</sup> Peran WFP dalam masa kedaruratan di Aceh dan Nias adalah WFP memobilisasi asetnya untuk mendukung usaha pemerintah dalam memberikan bantuan pangan bagi korban di Aceh. Guna mendukung upaya tersebut, WFP mendirikan markas besar di Banda Aceh untuk mengelola operasi bantuan. Pada minggu pertama operasinya, WFP membentuk Pusat Operasi Tsunami di Jakarta, sebuah *basecamp* di Banda Aceh, dan Sub-kantor di Medan sebagai pusat logistik utama untuk operasi darurat.<sup>11</sup>

Pada hari dan minggu pertama di Aceh, WFP melakukan pengangkutan makanan sebagai respon darurat. Seminggu setelahnya, mereka telah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> WFP, dalam [www1.wfp.org/overview](http://www1.wfp.org/overview), diakses pada 12 Desember 2017 07.20 WIB.

<sup>11</sup> WFP, 2012, *The Past, Present, and The Future: Aceh Tsunami Response, Recovery, and Preparedness*, dalam <https://www.wfp.org/sites/default/files/Aceh%20Book-FINAL.pdf>, diakses pada 5 November 2017 18.40 WIB.

menyediakan bantuan makanan darurat kepada lebih dari 500.000 korban selamat, menyediakan fasilitas penyimpanan dan internal hub untuk keperluan komunikasi dan menyambungkan banyak komputer di markas WFP. Dalam operasinya, WFP menggunakan helikopter milik militer untuk mendistribusikan makanan ke wilayah pantai barat (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue

Lalu, Pada akhir Januari 2005, WFP mendirikan gudang stok makanan, stok diambil dari BULOG di seluruh Provinsi Aceh. Ada gudang terapung yang berada di atas laut untuk memasok kebutuhan makanan di wilayah pantai barat dan dua kapal pendarat membawa makanan ke gudang penyimpanan di Meulaboh, Calang, Lamno, dan Teunom.<sup>12</sup>

Selain itu, WFP juga merupakan agen pertama di lokasi kejadian yang menginstal sistem *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) di beberapa lokasi di seluruh zona bencana. VSAT merupakan perangkat komunikasi berbentuk piringan untuk mengirim dan menerima data ke satelit. Dalam waktu 48 jam, fasilitas komputer dan komunikasi dipasang di titik distribusi makanan utama di sekitar area tersebut untuk melacak distribusi nasi, biskuit, dan ikan kalengan. WFP memperluas operasinya untuk mencakup 1,2 juta orang dengan bantuan makanan yang menyelamatkan korban di 14 kabupaten di seluruh Aceh dan Nias. Selama 3 tahun, lebih dari 250.000 ton makanan bergizi didistribusikan di lebih dari 5.000 titik distribusi di Aceh dan Nias dengan nilai lebih dari USD 200 juta. WFP juga memasang tiga *Special Operations* senilai USD 74 juta untuk dukungan logistik penting, koordinasi antar instansi melalui *United Nations Joint*

---

<sup>12</sup> WFP, *The Past, Present, and The Future: Aceh's Tsunami Response, Recovery, and Preparedness*, Op. Cit., hal. 17.

*Logistics Center* (UNJLC), dan layanan udara regional melalui *United Nations Humanitarian Air Services* (UNHAS). Operasi tersebut merupakan salah satu operasi terbesar WFP yang pernah ada.<sup>13</sup>

Selain jaringan makanan, jaringan logistik yang efektif juga berkembang pesat. WFP membeli 200.000 metrik ton beras dari BULOG dan menghadapi tantangan yang luar biasa yakni dengan 1.585 km jalan dan 1.880 jembatan rusak setelah tsunami, distribusi makanan melalui darat sama sekali tidak dapat diakses. Menanggapi masalah tersebut, WFP mengintensifkan pemanfaatan helikopter dan kapal pendarat di sepanjang pantai barat untuk memastikan pengiriman tepat waktu ke masyarakat terpencil.<sup>14</sup> WFP mendirikan kantor di empat lokasi strategis di Aceh yaitu di Lamno, Calang, Meulaboh, dan Lhokseumawe, yang mana stok penyangga satu bulan diposisikan. Sebuah kantor Sistem pelacak komoditas pangan WFP (*Compas* atau *Commodity Movement Processing and Analysis System*), sebuah database untuk melacak pergerakan komoditas dibentuk dan beroperasi di seluruh provinsi Aceh.

Kemudian, untuk mendistribusikan barang dalam situasi lingkungan yang sulit, terbatasnya fasilitas transportasi laut dan udara, WFP mendirikan sebuah maskapai penerbangan dan menciptakan *World Food Program Shipping Service*. Tujuan program ini adalah untuk tidak hanya mengangkut makanan dan personil WFP namun juga untuk mengangkut 98.000 metrik ton barang non-pangan yang diminta oleh seluruh komunitas kemanusiaan untuk membantu membangun kembali provinsi Aceh yang hancur akibat gempa dan tsunami. Helikopter dan

---

<sup>13</sup> WFP, *The Past, Present, and The Future: Aceh's Tsunami Response, Recovery, and Preparedness*, Op. Cit., hal. 14.

<sup>14</sup> WFP, *A Report From The Office Evaluations*, dalam [documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp079977.pdf](http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp079977.pdf), hal 25, diakses pada 5 November 2017 18.37 WIB.

kapal pendarat dari UNHAS secara intensif dioperasikan di sepanjang pantai barat untuk memastikan tersalurnya bantuan ke daerah terpencil.

Seminggu setelah tsunami terjadi di Aceh, WFP telah memobilisasi makanan ke daerah-daerah yang terkena dampak paling parah. WFP menyediakan bantuan makanan darurat untuk lebih dari 500.000 orang yang selamat di Aceh. Beras, Mie, biskuit, minyak sayur dan ikan kaleng didistribusikan setiap bulan.<sup>15</sup> Proses distribusi tersebut merupakan tantangan besar karena banyak area yang harus dijangkau terputus karena kerusakan yang parah. Tanggapan yang cepat merupakan kontribusi besar untuk mencegah kemerosotan status gizi anak dan ibu yang rentan. Pada bulan April, bantuan WFP mencapai 1,1 juta orang di Aceh dan Nias, di mana 562.000 penerima berada di Nias. Tahap pelaksanaan operasi darurat WFP di Aceh berlangsung selama tiga tahun. Dengan total anggaran sebesar USD 200 juta, jumlah total lebih dari 250.000 metrik ton makanan yang dibutuhkan di Indonesia dan mencapai 1,2 juta ben-efiensi.<sup>16</sup>

Selain itu, WFP bekerjasama dengan FAO dan melakukan asesmen pertama atas pasokan dan permintaan pangan di kabupaten-kabupaten yang terkena dampak tsunami Aceh. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa mata pencaharian sekitar 600.000 orang telah hilang akibat tsunami tersebut.<sup>17</sup> Fokus misi mereka adalah pemulihan pada sektor pertanian, berfungsinya pasar, dan perubahan status ketahanan pangan, gizi dan kerentanan orang-orang yang terkena dampak tsunami.

---

<sup>15</sup> WFP, *A Report From The Office Evaluations*, Op. Cit., hal. 17.

<sup>16</sup> WFP, *WFP Special Operations 10498.1*, dalam [one.wfp.org/operations/current\\_operations/project\\_docs/104981.pdf](http://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/104981.pdf), diakses pada 5 November 2017 18.42 WIB.

<sup>17</sup> FAO, *Special Report: FAO/WFP Food Supply And Demmand Assessment for Aceh Province and Nias Island (Indonesia)*, dalam <http://www.fao.org/docrep/008/J6992e/J6992e00.htm#11>, diakses pada 5 November 2017 18.42 WIB.

### 3.1.3 *International Rescue Committee (IRC)*

Keberadaan IRC di Aceh ternyata sudah ada sebelum tsunami terjadi karena IRC mempunyai kantor di Aceh. Sebelumnya, IRC telah membantu 125.000 orang yang menjadi korban perang sipil di Aceh. Dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman staf lokal di Aceh, IRC telah menjalin hubungan baik dengan organisasi lokal dan pemerintah lokal Aceh selama bertahun-tahun.<sup>18</sup> IRC berupaya untuk menyelamatkan korban, memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup korban, mengurangi penderitaan, menjaga kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi para korban tsunami Aceh.<sup>19</sup>

IRC memiliki tim bantuan keliling yakni spesialis kesehatan, air, sanitasi, dan perlindungan anak yang disebar ke seluruh daerah di Aceh yang disediakan untuk memberikan layanan darurat kepada desa-desa yang terkena dampak paling parah.<sup>20</sup> Karena sulitnya medan dan banyaknya wilayah yang terisolasi, mobilisasi bantuan IRC menggunakan kapal, truk, dan helikopter untuk membawa bantuan dan memberikan pelayanan medis yang mendesak, membangun fasilitas sanitasi darurat, membawa air bersih, melindungi mata air, membersihkan sumur dan memberikan disinfeksi.<sup>21</sup>

IRC juga melakukan pengidentifikasian anak-anak yang rentan atau yang terkena trauma. Pengidentifikasian tersebut digunakan untuk memberikan bantuan psikososial, pendidikan, rekreasi, dan bantuan reunifikasi keluarga. IRC berkomitmen untuk menyediakan bantuan jangka panjang bagi masyarakat yang

---

<sup>18</sup> Relief Web, *Special Report: The IRC's Emergency Response to The Tsunami Disaster in Aceh, Indonesia*, dalam <https://reliefweb.int/report/indonesia/special-report-ircs-emergency-response-tsunami-disaster-aceh-indonesia>, diakses pada 7 November 2017 17.05 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Relief Web, *Indonesia: IRC's Tsunami Aid Efforts Gain Momentum*, dalam <https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-ircs-tsunami-aid-efforts-gain-momentum>, diakses pada 7 November 2017 17.08 WIB.



terkena dampak tsunami. Rekonstruksi pasca krisis merupakan kompetensi IRC. Rata-rata organisasi tersebut tetap berada di area bencana selama delapan sampai sepuluh tahun setelah keadaan darurat.

Selama tiga minggu setelah terjadinya tsunami, staf ICRC melakukan asesmen ke lebih dari 90 lokasi penampungan di Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe. Proses asesmen dilanjutkan dengan distribusi makanan dan bantuan kemanusiaan non pangan yang terdiri dari peralatan kebersihan, pakaian dan bahan dasar rumah tangga serta bahan-bahan penampungan lainnya. Lebih lanjut, ICRC menyediakan peralatan-peralatan bagi para relawan PMI untuk evakuasi korban. PMI Bersama TNI, Polri dan SAR mengumpulkan lebih dari 20.000 jenazah di kota Banda Aceh

Pada tanggal 6-13 Januari 2004, ICRC bekerjasama dengan PMI dalam mendistribusikan bantuan. ICRC memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan telah sesuai dengan kebutuhan pengungsi. Daftar bantuan yang diberikan oleh ICRC bersama PMI lihat pada *lampiran 4*.

ICRC bekerjasama dengan PMI melaksanakan kegiatan pemulihan hubungan keluarga bagi korban bencana tsunami Aceh. Untuk mendukung kegiatan tersebut, berbagai macam sarana pun digunakan seperti pertukaran berita palang merah, penggunaan telepon satelit, penggunaan formulir “Saya Selamat” dan “Saya Mencari”, hingga penggunaan website ICRC yakni [www.familylinks.org](http://www.familylinks.org) untuk membantu anak-anak tanpa pendamping dan mempublikasikan nama di media.<sup>22</sup> Tercatat hampir 26.500 nama dipublikasikan

---

<sup>22</sup> ICRC, *Indonesia: The Humanitarian Response Since The Tsunami*, Op. Cit.

di media, dan lebih dari 2.600 panggilan telepon dilakukan. Secara keseluruhan ICRC telah menangani lebih dari 40.000 kasus.<sup>23</sup>

#### **3.1.4 *International Federations of Red Cross dan Red Crescent Societies***

Besarnya kehancuran akibat tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 ini menyebabkan kebutuhan akan datangnya bantuan menjadi lebih besar pula. Selama operasi tanggap darurat, fase pemulihan, dan fase rekonstruksi jangka panjang anggota *International Federations of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC) terlibat secara aktif untuk membantu Indonesia.<sup>24</sup>

Banyak Palang Merah anggota Federasi dari negara berbagai negara tetangga memberi bantuan seperti Palang Merah Singapura mengerahkan dokter, perawat dan bantuan medis lainnya ke Indonesia. Selain itu ada Komunitas Bulan Sabit Merah dari Malaysia juga mengerahkan lima anggota *Regional Disaster Response Teams* yang terdiri dari seorang dokter dan empat petugas bantuan dan pelaporan ke Provinsi Aceh.<sup>25</sup>

Lalu, IFRC bekerja sama dengan ICRC dan PMI. Delegasi dari beberapa negara anggota IFRC datang dalam jumlah besar sejak awal terjadinya bencana. Pada tanggal 31 Januari 2005, perwakilan PMI, IFRC, dan ICRC mencapai sebuah kesepakatan yaitu *Movement Coordination Framework* (MCF) untuk mengkoordinasikan kegiatan bagi semua anggota.

---

<sup>23</sup> ICRC, *Indonesia Remembering The Tsunami and It's Aftermath*, dalam <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/feature/2009/indonesia-tsunami-feature-231209.htm>, diakses pada 4 November 2017 17.28 WIB.

<sup>24</sup> IFRC, *Tsunami 5 Years Progress Report 2004-2009*, dalam <http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/tsunami/IFRC-Tsunami-5Yrs-Report-Final-Web.pdf>, diakses pada 5 November 2017 20.09 WIB.

<sup>25</sup> IFRC, *Stronger Together The Global Red Cross Red Crescent Response to the 2004 Indian Ocean Earthquake and Tsunami*, dalam <https://fas.org/sdp/crs/row/RL32715.pdf>, diakses pada 7 November 2017 17.34 WIB.

Tujuan kesepakatan ini adalah agar inklusif dan membantu mengintegrasikan semua anggota federasi, serta menghindari tumpang tindih pembagian tugas, duplikasi usaha dalam semua fase pemberian bantuan di Aceh. Berikut daftar anggota Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah yang terlibat dalam misi pemberian bantuan bencana tsunami Aceh. Daftar Anggota Federasi yang Memberikan Bantuan Saat Tsunami Aceh 2004 lihat pada *lampiran 5*.

Ada sebuah kelompok kerja yakni *Technical Working Groups* (TWGs) yang dibentuk IFRC yang bertugas di enam sektor yakni sektor kesehatan, perawatan, air dan sanitasi, manajemen bencana, mata pencaharian dan keamanan ekonomi, rekonstruksi, dan pengembangan organisasi. Semua mitra yang tergabung dalam federasi dan telah menyatakan minat dalam operasi tersebut dipersilahkan untuk mengambil bagian dalam kelompok. Contohnya ada Palang Merah Australia yang bertugas di (sektor kesehatan) bagian darah dan ambulance, Palang Merah Denmark pada bagian dukungan psikososial, Palang Merah Inggris pada bagian mata pencaharian.<sup>26</sup> Lalu, IFRC dan PMI berkoordinasi dalam pengadaan air dan sanitasi, konstruksi dan pengembangan organisasi. Dua pusat layanan didirikan oleh IFRC di Banda Aceh dan Jakarta untuk kepentingan administrasi dan layanan dukungan logistik kepada anggota federasi yang bekerja di Indonesia. Ada basis logistik di Medan dan kantor IFRC didirikan di Meulaboh, Calang dan Nias.

Selain itu, Pencegahan wabah penyakit yang berkaitan dengan air dan sanitasi tetap menjadi fokus utama dengan terus meningkatkan kapasitas PMI di sektor ini, air minum yang bersih dan aman diberikan kepada para korban di

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 65.

penampungan sementara dan rumah tangga di lebih dari 200 desa. Rehabilitasi sumur, promosi kebersihan dan rekonstruksi adalah komponen lain di program organisasi tersebut. Semuanya terintegrasi sepenuhnya dengan inisiatif kesehatan berbasis masyarakat yang telah diprioritaskan oleh PMI. Palang Merah Norwegia membagikan selimut, memberikan konseling, dan transportasi ke rumah atau rumah sakit, dan mendirikan pusat dukungan keluarga di beberapa daerah. Berikut tabel total pengeluaran anggaran bantuan yang telah diberikan.

**Tabel. 3.1 Total Pengeluaran Anggaran Bantuan IFRC untuk Indonesia (dalam Jutaan Swiss Francs)<sup>27</sup>**

Fase Tanggap Darurat	Kesehatan dan Perawatan	Manajemen Bencana	Mata Pencaharian	Pengembangan Organisasi	Program Dukungan dan Koordinasi	Selter dan Rekonstruksi	Total Pengeluaran
234.4	181.4	55.9	78.2	566.7	18.6	119.0	<b>1254.1</b>

### 3.1.5 Bantuan Multilateral

Disamping secara bilateral, bantuan juga datang dari lembaga-lembaga multilateral, seperti deskripsi pada tabel berikut.

**Tabel 3.2 Bantuan dari Lembaga Multilateral<sup>28</sup>**

Negara	Jumlah (komitmen)	Sifat
<b>World Bank</b>	US\$301,00 juta	Pinjaman (loan) Hibah US\$275,00 juta
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>	US\$401,30 juta	Pinjaman (loan) US\$126,30 juta Hibah

<sup>27</sup> IFRC, *Tsunami 5 Years Progress Report 2004-2009*, Op. Cit.

<sup>28</sup> RI, *Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku Xi: Pendanaan, Opcit*, hal. 13.

<b>United Nations (UN)</b>	US\$371,00juta	
<b>Islamic Development Bank (IDB)</b>	US\$213,00 juta	Hibah US\$3,00 juta Pinjaman (loan) US\$ 210,00 juta

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dana yang diberikan negara atau lembaga donor berupa hibah (*grant*) dan berupa pinjaman (*loan*). World Bank memberikan bantuan dengan skema hibah sebesar 275 juta USD dan sisanya dengan skema loan sebesar 26 juta USD. ADB memberikan bantuan sebesar 401,30 juta USD, dengan rincian 126,30 juta USD berupa hibah dan sisanya merupakan pinjaman. PBB memberikan bantuan sebesar 371 juta USD. Sedangkan IDB, memberikan dana hibah sebesar 3 juta USD dan memberi pinjaman 210 juta USD.

Bantuan-bantuan dari Lembaga donor ini tidak hanya diperuntukan untuk masa kedaruratan saja, namun juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pasca bencana. Menurut BNPB, fokus bantuan lembaga internasional digunakan untuk keperluan RR. Meski demikian, bantuan yang datang bukan berarti tidak dialokasikan untuk masa kedaruratan, karena masa kedaruratan juga membutuhkan waktu yang lama hingga mencapai masa pemulihan.<sup>29</sup>

Namun dalam kenyataannya masa kedarutan memakan waktu yang lebih lama dari ketentuan dalam Kepres. Selain itu, penggunaan dan pengelolaan dana

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Direktorat Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Yus Rizal, DCN, M.Epid pada tanggal 6 Juli 2017.

hibah luar negeri diserahkan kepada negara penerima. Hal yang menjadi kendala dalam proses penelusuran data mengenai bantuan Lembaga internasional ini, tidak tersedianya data detail alokasi dana yang digunakan pada masa kedaruratan.

Lebih lanjut, bantuan dari masyarakat internasional juga ada yang berbentuk moratorium atau penundaan pembayaran kewajiban pembayaran hutang. Paris Club pada sidang tanggal 9 Maret 2005 telah memutuskan untuk memberikan moratorium utang kepada Indonesia sebesar Rp. 3,9 triliun. Hutang tersebut ditangguhkan selama lima tahun dengan masa tenggang satu tahun. Selain itu, berikut tabel bantuan atau hibah dari beberapa INGO.

**Tabel 3.3 Bantuan atau Hibah dari Beberapa INGO<sup>30</sup>**

Nama Lembaga	Jumlah Bantuan	
	Region (Juta USD)	Indonesia (Juta USD)
1. Care Internasional	577,5	346,5
2. Oxfam International	200,0	120,0
3. World Vision Intl.	250,0	150,0
4. Mercy Corps	35,5	21,3
5. Direct Relief	2,2	1,3
6. Christian Children Faund	9,7	5,8
7. Medicine Sans Frontiers	54,9	32,9
8. Plan Internasional	20,0	12,0
9. Save the Children	200,0	120,0
10. Chatolic Relief Service	80,0	48,0
11. Habitat Humanity	20,0	12,0

Berbagai sumber bantuan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor, dan banyak organisasi internasional di atas merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana gempa dan tsunami tanpa melalui APBN (*off budget*).

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 14.

### 3.2 Bantuan Negara-Negara Asing

Banyak sekali bantuan dari dunia internasional yang datang untuk Indonesia. Bentuk bantuan tersebut bermacam-macam yang secara garis besar terbagi menjadi lima jenis yakni, barang, tenaga, peralatan, keahlian dan uang. Bantuan yang langsung dapat dinikmati oleh korban bencana adalah bantuan yang berbentuk barang, tenaga, peralatan dan keahlian. Dapat dilihat bagaimana anggota-anggota militer negara-negara sahabat dengan keahlian dan teknologi yang mereka miliki memberikan bantuan langsung kepada rakyat Aceh seperti penyediaan alat-alat berat dan transportasi udara, penyediaan air bersih, penyediaan tenaga medis dan obat-obatan, membersihkan puing-puing dan mayat yang berserakan, mengevakuasi korban-korban yang terisolir dan mengangkut barang-barang kebutuhan pokok para korban. Daftar Bantuan Bilateral Bencana Aceh 2004 lihat pada *lampiran 6*.

Pemerintah Indonesia menyatakan persetujuan untuk menerima tawaran *moratorium*.<sup>31</sup> Hibah luar negeri di atas terdiri dari beberapa negara donor yang tergabung dalam *Consultative Group on Indonesia* (CGI) yang menyampaikan kesediaan untuk memberikan bantuan. Dana yang tercantum di atas adalah total keseluruhan bantuan dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk uraian lebih lanjut akan dijelaskan pada poin berikutnya.

---

<sup>31</sup> *Moratorium* merupakan salah satu sumber pembiayaan penanggulangan bencana Aceh pada tahun anggaran 2005. *Paris Club* pada sidang tanggal 9 Maret 2005 telah memutuskan untuk memberikan *moratorium* utang kepada negara yang terkena bencana tsunami sampai dengan 31 Desember 2005.

### 3.2.1 Amerika Serikat

Bantuan Amerika Serikat (AS) terhadap tanggap darurat Tsunami Samudera Hindia dipublikasikan secara resmi dalam *bulletin* yang dirilis oleh U.S. Agency for International Development, Bureau for Legislative and Public Affairs. *Bulletin* ini dirilis pada bulan april tahun 2005. Negara pertama yang diberikan bantuan oleh US adalah Indonesia dan Thailand, masing-masing mendapatkan \$100,000 yang disalurkan melalui palang merah maupun badan penanggulangan bencana masing-masing.<sup>32</sup> Lebih lanjut, AS saat itu sudah memiliki badan untuk menanggulangi bencana yang bernama USAID. USAID mengirimkan *Disaster Assistance Response Team* (DART). Dana USAID ditujukan ke UNICEF, World Vision, the World Health Organization, Mercy Corps, the International Rescue Committee, Muhammadiyah, Project Concern International, CARE dan kelompok lainnya. Untuk rincian bantuan tanggap darurat yang diberikan oleh US hingga bulan april ada dalam tabel berikut;

**Tabel 3.4 Bantuan Amerika terhadap Indonesia<sup>33</sup>**

Bantuan Pemerintah Amerika di Indonesia	
Bantuan dari Militer Amerika:	Bantuan sipil sebesar \$42 juta dikirim pada 1 April 2005:
1. Pesawat pengangkut Lincoln dan kapal Amerika lain, helikopter dan pesawat induk untuk mengirimkan bantuan	1. 80 truk sewa untuk mengirimkan bantuan
2. Sekitar 16.000 prajurit US dan AU membantu pengiriman bantuan dan mengevakuasi korban luka	2. Peralatan dapur untuk 100.000 orang
3. Rumah sakit kapal militer US merawat 20.000 korban	3. Jaring nyamuk untuk 30.000 orang
	4. Kontainer air untuk 210.000 orang
	5. Peralatan higienis untuk 10.000 orang

<sup>32</sup> U.S. Agency for International Development, Bureau for Legislative and Public Affairs, *Tsunami Relief*, 2005, hal 8

<sup>33</sup> *Ibid.*



tsunami 4. 4,8juta pon makanan, air dan obat-obatan	6. Tenda plastik untuk 690 orang 7. 25 juta kru kebersihan
--	---

Dari tabel di atas bisa dilihat jika bantuan dari Amerika Serikat beragam dan lebih didominasi oleh bantuan non-pangan seperti personil militer, bantuan medis, keperluan sanitasi, keperluan rumah tangga, tenda, dan tim kebersihan. Militer US pada hari Jum'at, 31 Desember 2004, mengirimkan tim udara US Abraham Lincoln untuk mendistribusikan makanan dan air bersih kepada pengungsi di pesisir Aceh. Lalu, helikopter dan pesawat angkatan laut A.S. dari kapal induk Abraham Lincoln dan Bonhomme Richard menerbangkan bantuan berupa 4,8 juta pon makanan, air dan obat-obatan.<sup>34</sup> Militer Amerika mengevakuasi 3.000 korban tsunami Indonesia ke tempat penampungan dan rumah sakit. Di bandara Banda Aceh setiap pagi, 20 perwira AS, Jerman, Jerman, Australia dan militer lainnya bertemu dengan petugas U.N. untuk mengkoordinasikan bantuan.<sup>35</sup>

### 3.2.2 Australia

Kurang dari 36 jam pasca tsunami, Australia mengirimkan 4 helikopter jenis Hercules RAAF-C130 untuk mengirimkan staff medis dan suplai bantuan kemanusiaan lainnya ke Indonesia.<sup>36</sup> Total bantuan dari pemerintah Australia untuk penanganan tanggap darurat Tsunami Aceh sebesar \$34.4 juta, dengan rincian; \$16 juta untuk membantu dalam segi medis yang disalurkan melalui WFP,

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, *Indian Ocean Tsunami*, <http://dfat.gov.au/news/news/Pages/indian-ocean-tsunami.aspx>, diakses pada 19 November 2017 13.07 WIB.

Surfaid, World Bank; \$7,7 juta disalurkan melalui UNICEF, UNDP dan WHO untuk membangun kembali berbagai sarana prasarana dasar; \$6,8 juta dialokasikan untuk mobilisasi tim ahli dari Pemerintah Australia, relawan, personil militer dan tim medis. Sisanya, \$3,9 juta dianggarkan untuk NGO Australia.<sup>37</sup>

### 3.2.3 Switzerland

Sebagai negara yang terkenal akan sejarah palang merahnya, Swiss merespon peristiwa Tsunami Aceh dengan cepat. *Swiss Humanitarian Aid* mengirimkan *Rapid Response Team* untuk melihat lokasi dan menaksir kebutuhan apa saja yang diperlukan. Swiss menyumbang sebesar CHF 11,3 juta untuk kebutuhan tanggap darurat di Indonesia.<sup>38</sup> Swiss juga turut memberikan sumbangan finansial kepada beberapa penyelenggara kegiatan darurat seperti IFRC, ICRC, WFP dan OCHA.<sup>39</sup>

Swiss mengangkut 160 ton logistik yang didaratkan di Medan, Sumatra Utara. Selain itu, Swiss membangun sistem informasi di sejumlah rumah sakit darurat di Banda Aceh. Swiss juga memberikan *support* kepada UNHCR berupa 50 personil militer dan 3 helikopter super puma. Swiss memberikan uang senilai CHF 120 kepada 7500 keluarga yang memberikan tempat bernaung untuk pengungsi di Banda Aceh dan sekitarnya. Selain itu Swiss membuat 8 sumur darurat di Meulaboh dan membersihkan 600 sumur untuk air minum.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Swiss Agency for Development and Cooperation, *Switzerland's commitment in Indonesia following the tsunami*

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid.*

### 3.2.4 Jerman

Selain mengirimkan bantuan dana untuk pendidikan, air bersih dan pemulihan sarana prasarana lainnya, Jerman juga mengirimkan bantuan lainnya seperti personel, paramedis, logistik dan alat-alat medis. Jerman terlebih dahulu mengirim tim investigasi untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan agar mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Selain untuk menginvestigasi keadaan di lapangan, menaksir logistik yang dibutuhkan, tim ini juga mencari rute yang sekiranya aman dilewati untuk mengirim bantuan. Jerman berencana mengirimkan 40 unit *Mobile Field Hospital*.<sup>41</sup>

*Mobile Field Hospital* adalah rumah sakit dengan memiliki teknologi canggih yang dapat dipindahkan. Rumah sakit ini berkapasitas 22 orang dan 3 diantaranya untuk perawatan pasien intensif. Selain itu, rumah sakit ini memiliki alat diagnosa yang lengkap, seperti mesin *x-ray*, mesin ultrasonik dan alat laboratorium lainnya. Rumah sakit ini juga dapat digunakan untuk operasi selama lebih dari 20 hari.<sup>42</sup>

Jerman juga mengirimkan 120 paramedis untuk mengoperasikan rumah sakit tersebut. Jerman mengalami kendala ketika akan mengirimkan *Mobile Field Hospital*. Kendalanya adalah tidak adanya tempat untuk mendaratkan *Mobile Field Hospital*, sehingga tim investigasi tidak segera mengirimkan rambu hijau dan bantuan tidak bisa segera diterbangkan. Jerman juga mengirimkan kapal rumah sakit yang dinamai "Berlin".<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Deutsche Welle, *German Army Tends To Tsunami Victims*, <http://www.dw.com/en/german-army-tends-to-tsunami-victims/a-1456912> diakses pada 12 Desember 2017 17.09 WIB.

<sup>42</sup> Deutsche Welle, *German Army Gears up for "Mission Aceh"*, dalam, <http://www.dw.com/en/german-army-gears-up-for-mission-aceh/a-1448139> diakses pada 12 Desember 2017 17.13 WIB

<sup>43</sup> *Ibid*

### 3.2.5 Singapura

Sebagai negara rumpun yang lokasinya dekat dengan Aceh, bantuan dari Singapura adalah bantuan asing yang pertama datang. Pada tanggal 28 Desember 2004, tim dari Singapura berangkat menuju Medan, Sumatra Utara, dengan membawa logistik seperti makanan, tenda, selimut dan obat-obatan. Selain itu, karena semua akses lumpuh termasuk akses jalan dan komunikasi, maka tim dari Singapura yang membuka jalan. Tim berhasil membuka dua poin pendaratan di pantai dan tujuh titik *landing* helikopter di kota Meulaboh, sehingga membuka jalan untuk aliran logistik yang sebelumnya tidak bisa karena akses terputus total.<sup>44</sup>

Berdasar dari wawancara penulis dengan seorang pejabat Ditjen Kerjasama Teknis Kementerian Luar Negeri Indonesia, Singapura lah yang mengambil alih sistem komunikasi ke Aceh. Dikarenakan seluruh menara komunikasi di Aceh lumpuh total.<sup>45</sup> Situs resmi pemerintah Singapura membenarkan bahwa Singapura memberikan perangkat telekomunikasi dan menara lalu lintas udara, untuk koordinasi terkait masalah bantuan dan juga mengatasi kemacetan udara di Aceh.<sup>46</sup> Selain itu singapura juga memberikan *filter air portable*.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> National Library Board Singapore, “Operation Flying Eagle” is activated after Asian Tsunami, dalam <http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/51f0da77-0362-4f5d-97bf-aba1a6f37dd0> diakses pada 13 Desember 2017 13.06 WIB

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor Hardjono Direktorat Kerja Sama Teknis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 6 Juni 2017 di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

<sup>46</sup> National Library Board Singapore, “Operation Flying Eagle” is activated after Asian Tsunami, *Op. Cit.*

<sup>47</sup> *Ibid*

Tim medis Singapura tercatat merawat sekitar 5174 korban yang tersebar di Banda Aceh dan Meulaboh. Sementara itu bantuan logistik dari Singapura diangkut menggunakan helikopter super puma, chinook, *landing ship, tank* dan juga pesawat C-130. Singapura juga mengirimkan bantuan personel militer dan tim *Disaster Victim Identification* (DVI) yang bertugas untuk mengidentifikasi korban meninggal dan kemudian dimasukkan dalam database.<sup>48</sup>

### 3.3 Negara-negara Asing Lain yang Tidak Tercatat

#### 3.3.1 China

Ketidaksiapan Indonesia dalam masa kedaruratan menyebabkan kondisi di lapangan menjadi tidak terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercatatnya bantuan internasional yang masuk. Kondisi tersebut diakui oleh Ditjen Kerja Sama Teknis Kementerian Luar Negeri Victor Hardjono. Menurutnya, tidak terkoordinasikannya dengan baik bantuan yang datang, salah satunya sempat menimbulkan keberatan dari China atas bantuan dari Taiwan.<sup>49</sup>

Seperti diketahui, China menjalankan kebijakan luar negeri yang disebut sebagai *One China Policy* (kebijakan satu China) kepada negara-negara lain di dunia, untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari China. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena konflik berkepanjangan antara Taiwan dan China. Taiwan tidak mengakui otoritas China dan beranggapan bahwa mereka adalah negara sendiri yang beraliran nasionalis. Sementara China sendiri bersikukuh bahwa Taiwan merupakan provinsi bagian Fujian yang memberontak.

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Victor Hardjono Direktorat Kerja Sama Teknis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. Cit.*

Untuk menjaga hubungannya dengan China, Indonesia berkomitmen menghormati prinsip *One China Policy* tersebut dengan tidak mengakui Taiwan sebagai wilayah yang terpisah dari China dan secara *de jure* hanya memiliki hubungan kerjasama dengan RRC. Meski demikian secara *de facto*, Indonesia juga melalui prinsip politik luar negeri bebas dan aktif melakukan hubungan kerjasama dengan Taiwan meski hanya sebatas hubungan ekonomi saja.<sup>50</sup>

Atas alasan politik luar negeri bebas aktif dan karena masa kedaruratan, China paham akan situasi darurat bencana yang sedang terjadi di Asia, khususnya Indonesia, maka China tidak memboikot aksi kemanusiaan dari Taiwan, justru China malah memberikan bantuan dengan jumlah yang lebih besar daripada Taiwan.

Menanggapi ketegangan perihal bantuan Taiwan, meski dalam kondisi darurat, Pemerintah Indonesia tetap menjalankan diplomasinya dengan meminta kepada pihak Taiwan untuk mengirimkan bantuan meski melalui pesawat militer, namun nomor penerbangan ditutup dan diganti dengan nomor register sipil, sehingga terdaftarnya pun sebagai bantuan sipil.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Implikasi *One China Policy* terhadap hubungan luar negeri Indonesia dan Taiwan yaitu Indonesia membatasi kerjasamanya hanya di bidang ekonomi melalui KDEI (Kantor Dagang Ekonomi Indonesia) yang berada di Taipei. KDEI adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-government. Tugas dari KDEI adalah memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan. KDEI juga berfungsi sebagai konsuler yang memberikan pelayanan untuk mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi dan melindungi WNI di Taiwan. M. Fahrezal Maulana, et.al., *Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Diponegoro Law Journal Vol.5, No.3 tahun 2016, hal. 4-5, akses dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12583/12213> diakses pada 13 Desember 2017 11.02 WIB.

<sup>51</sup> *Ibid*

### 3.3.2 Korea Utara

Salah satu negara yang memberikan sumbangan terhadap Indonesia adalah negara yang selama ini dikenal sebagai negara isolatif dan membangkang (*Rogue State*) Korea Utara. PBB dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Korut dalam bentuk pembatasan perdagangan Korut dengan negara mitra, antara lain larangan impor minyak, larangan ekspor tekstil, dan berakhirnya kontrak pekerja Korut di luar negeri.<sup>52</sup>

Menurut sejarahnya, Indonesia dan Korea Utara memiliki hubungan persahabatan yang cukup dekat, terutama pada masa Orde Lama. Hingga Orde Reformasi pun, melalui politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Korea Utara meskipun negara tersebut merupakan yang terisolir secara sistemik. Hal ini bisa dibuktikan dengan Impor Korut ke RI jumlahnya sebesar US\$ 1,41 juta. Impor Korut terhadap Indonesia adalah residu sayur yaitu sebesar 42 persen dengan total impor senilai US\$ 597 ribu dan sabun dari Indonesia senilai US\$ 600 ribu.<sup>53</sup>

Jarang sekali ada yang merekam bantuan yang diberikan oleh negara berideologi komunis tersebut terhadap Tsunami Aceh. Korea Utara menawarkan \$150.000 untuk upaya penanggulangan bencana tsunami.<sup>54</sup>

Namun mengenai bantuan yang dijanjikan oleh Korea Utara ini, tidak ada data konfirmasi apakah bantuan yang dijanjikan diberikan secara penuh. Mengutip dari data New York Times, bahwa terdapat kekhawatiran tentang pola umum

---

<sup>52</sup> *Negara-Negara yang Berdagang dengan Korea Utara, Indonesia?* <http://global.liputan6.com/read/3100542/negara-negara-yang-berdagang-dengan-korea-utara-indonesia> diakses pada 13 Desember 2017 11.08 WIB.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> BBC News, *Tsunami Aid: Who's giving what?* Dalam: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4145259.stm> diakses pada 13 Desember 2017 11.10 WIB.

dalam bencana besar, dimana uang yang dijanjikan oleh negara-negara yang lain pada saat isu tersebut mendominasi berita internasional, nantinya tidak disampaikan secara penuh.<sup>55</sup>

Asumsi tersebut beralasan, mengingat perjanjian bantuan internasional yang ditawarkan pada saat gempa gempa di Bam Iran pada Desember 2003 silam, di mana hanya sebagian kecil dari ratusan juta dolar yang dijanjikan telah dibayarkan. Ketika ditanya tentang perbedaan antara janji dan sumbangan sebenarnya, Kofi Annan dalam KTT khusus tsunami mengatakan sering mendapat janji bantuan yang besar dari negara-negara lain untuk pemulihan bencana, namun pada realisasinya jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam KTT tersebut, Annan menghimbau agar kejadian seperti itu tidak terulang dalam bantuan bencana tsunami.

### 3.3.3 Israel

Negara selanjutnya yang menawarkan bantuan intrnasional adalah Israel. Hal yang menarik perihal bantuan Israel berdasarkan hasil wawancara dengan Victor Hardjono, dimana Israel datang dengan tim DVI (*Disaster Victims Identification*) sebuah lembaga non pemerintah yang membawa bantuan ke Indonesia.<sup>56</sup>

Sebahagian bantuan Israel telah dibongkar selama 2 jam di Bandara Hang Nadim Batam, namun karena tidak memiliki hubungan diplomatik secara langsung dengan Indonesia, akhirnya bantuan tersebut harus diterima oleh

---

<sup>55</sup> U.N. Chief Urges Immediate Aid for Tsunami-Torn Countries, <http://www.nytimes.com/2005/01/06/international/worldspecial4/un-chief-urges-immediate-aid-for-tsunamitorn.html> diakses pada 13 Desember 2017 11.11 WIB.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Letkol Ikwon Direktorat Kerja Sama Internasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 6 Juni 2017 di kantor Kementerian Pertahanan



Indonesia melalui perantara Singapura. Setelah dinegosiasikan kembali, bongkar muat bantuan Israel dilakukan di ruang udara milik Singapura di Batam dengan syarat tidak memasang logo *El Al Israel Airlines* pada badan pesawat.<sup>57</sup> Menurut Letkol Ikwan dari Ditjen Kerja Sama Internasional Kementerian Pertahanan RI, Israel membantu melalui perantara dengan menitipkan bantuan kemanusiaannya kepada negara yang berhubungan diplomatik dengan Indonesia dan Israel sendiri.<sup>58</sup>

Terkait persoalan yang berhubungan Israel, Indonesia sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Secara vertikal hal ini berhubungan dengan persoalan menjaga legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Bagi masyarakat Indonesia, isu Israel merupakan isu sensitif yang tidak dapat dilepaskan dari unsur nilai dan ideologi. Tekanan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia sangat kuat terkait bagaimana pemerintah Indonesia harus mengambil sikap terkait isu Israel, misalnya dalam konteks konflik dengan Palestina. Begitu pula soal sikap Indonesia terkait bantuan Israel. Nampaknya, Indonesia bersikap hati-hati, sehingga harus memutuskan untuk melobi Israel untuk pengiriman bantuan melalui Singapura.

Dari deskripsi diatas, dapat dilihat bagaimana pada masa kedaruratan yang pada satu sisi bencana bersifat kosmopolitan, namun pada sisi lain pemerintah harus memelihara hubungan vertikalnya dengan masyarakat sebagai konstituen dan pemakai bantuan. Pemerintah Indonesia lebih memilih menghindari tekanan

---

<sup>57</sup> *Solidaritas Yahudi untuk Tsunami Aceh*, <https://tirto.id/solidaritas-yahudi-untuk-tsunami-aceh-cBUo> diakses pada 13 Desember 2017 11.15 WIB.

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Letkol Ikwan Direktorat Kerja Sama Internasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 6 Juni 2017 di kantor Kementerian Pertahanan, *Op.cit*

dan resistensi public dari pada harus berhadapan dengan menurunnya legitimasi masyarakat sebagai konsekuensi menerima bantuan Israel.

#### **3.3.4 Rusia, Qatar, Cekoslovakia dan New Zealand**

Rusia juga memberikan bantuan tanggap darurat sebesar \$10 juta kepada negara-negara terdampak tsunami, namun tidak disebutkan pembagian ke setiap negara.<sup>59</sup> Berikutnya, Qatar memberikan \$25 juta dan bantuan medis serta logistik yang juga tidak dicantumkan berapa pembagian ke setiap negara resipien.<sup>60</sup> New Zealand memberikan sumbangan senilai \$56.000 yang berupa makanan, obat-obatan dan pakaian seberat 6 Ton kepada Bakornas melalui NGO New Zealand yang bernama *Canterbury Tsunami Relief*.<sup>61</sup>

Menteri luar negeri Ceko sempat hadir ke Aceh untuk meninjau keadaan di lapangan. Menlu Ceko juga menyalurkan bantuan dari pemerintah Ceko yang berupa alat sekolah, makanan dan alat penjernih air. Bantuan ini ditaksir sekitar \$370.000. Bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada Wagub Aceh dan disaksikan oleh Menkokesra Alwi Sihab.<sup>62</sup>

Tsunami Aceh telah menjadi pelajaran yang berharga bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya yang ada dalam masalah kebencanaan, lalu mengkoordinasikan dengan tepat. Masih banyak negara yang memberikan bantuan tanggap darurat kepada Indonesia, namun karena banyak yang tidak terdokumentasikan dengan baik, maka tidak semua tercantum dalam penelitian ini. Hal inilah yang kemudian menjadi catatan kelemahan penanganan bencana di

---

<sup>59</sup> BBC News, *Tsunami Aid: Who's giving what? Op. Cit.*

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Posko Nasional Penanganan Bencana Aceh Dan Sumut, *Memorandum No. 53*, 18 Februari 2005

<sup>62</sup> Posko Nasional Penanganan Bencana Aceh Dan Sumut, *Memorandum No. 77*, 14 Maret 2005

Indonesia sebelum tahun 2007 dimana belum terlembaganya dengan baik sistem penanganan bencana hingga dibentuknya BNPB tahun 2008.

Dari berbagai deskripsi diatas dapat diambil kesimpulan, peran bantuan internasional dalam tanggap darurat pada umumnya dapat dikategorikan dalam beberapa jenis bantuan antara lain; Bantuan Pendanaan yang terdiri dari dua skema yaitu hibah (*grant*) dan pinjaman (*loan*), bantuan personil SAR, bantuan pemulihan traumatic, bantuan medis, bantuan logistik, bantuan kendaraan dan peralatan berat.

Bantuan-bantuan asing tersebut diatas pada beberapa aspek menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan militer asing, skema bantuan pendanaan, dan negara pendonor. Berhubungan dengan militer asing, terdapat kekhawatiran akan adanya aktivitas lain yang dimanfaatkan oleh asing selain yang berhubungan dengan aktivitas kedaruratan bencana misalnya, spionase dan intelijen, dan aktivitas yang membantu GAM.<sup>63</sup>

Perlu diketahui pada saat terjadi tsunami, Aceh masih berstatus Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga kekhawatiran akan adanya hubungan GAM dengan pihak asing menjadi sangat beralasan. Apalagi selain banyak personil militer asing juga banyak peralatan militer asing baik di dalam Aceh maupun di wilayah perairan Sumatera.

Skema bantuan pendanaan juga menimbulkan perdebatan. Pada satu sisi bantuan internasional diperlukan bagi penanganan bencana Tsunami Aceh. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk melakukan diplomasi dengan memanfaatkan situasi kedaruratan bencana untuk mendapatkan bantuan

---

<sup>63</sup> Liputan 6, *Kisah SBY Hadapi Tsunami Aceh, Ancaman GAM dan Bantuan Asing* dalam <http://news.liputan6.com/read/2152838/kisah-sby-hadapi-tsunami-aceh-ancaman-gam-dan-bantuan-asing> diakses pada November 2017 20.10 WIB.

internasional. Hal ini seperti yang dikatakan oleh SBY "Indonesia tidak meminta-minta, tetapi jika ada bantuan kemanusiaan tentu kami terima."<sup>64</sup> Upaya diplomasi Indonesia pada masa darurat bencana tsunami dilakukan dengan dua cara, bilateral dan multilateral. Secara bilateral, Indonesia mengharapkan bantuan dari negara-negara sahabat. Sedangkan secara multilateral dilakukan melalui *Tsunami Summit* dan kerjasama regional ASEAN.

Di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa skema bantuan *loan* akan menimbulkan ketergantungan Indonesia pada pihak asing khususnya negara pendonor besar. Kemudian pinjaman yang ditawarkan oleh Lembaga dan negara pendonor internasional akan semakin menambah beban hutang negara. Namun pemerintah dibawah komando SBY memutuskan untuk tetap menerima bantuan asing namun harus selektif. Untuk masalah pendanaan SBY lebih memilih untuk menerima bantuan yang bersifat hibah. Adapun pinjaman dana yang diterima adalah pinjaman dengan rentang waktu yang Panjang dan bunga yang kecil agar tidak menjadi beban berat negara.<sup>65</sup>

Selain itu negara pendonor juga menjadi masalah yang dipertimbangkan oleh negara. Pemerintah sangat berhati-hati menerima bantuan dari negara-negara lain yang berlawanan secara ideologi. Pertimbangan tersebut, *pertama*, antipati masyarakat terhadap bantuan Israel yang dikenal sebagai negara yahudi yang menjadi musuh islam, terutama Palestina. *Kedua*, pertimbangan bahwa bantuan dari negara asing seperti Israel dikhususkan untuk Aceh yang dikenal sangat islami yang dikenal sebagai negeri Serambi Mekah. Tentu bantuan dari Israel

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

akan menjadi sensitif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, khususnya Aceh.

Selain itu, mengenai bantuan internasional di atas adalah ketika dalam status bencana internasional, negara harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pengaturan segala hal yang masuk dari luar untuk tanggap darurat. Jangan sampai bencana menjadi titik lemah pertahanan suatu negara terhadap segala kemungkinan ancaman yang masuk.

Catatan penting berikutnya adalah bantuan internasional dalam konteks bencana, selain menekankan pada status kebencanaannya, juga bersifat *cosmopolitan* yang menekankan pada solidaritas global terhadap setiap permasalahan yang berhubungan dengan *humanity*. Menariknya lagi, bencana juga bisa menjadi alat diplomasi negara untuk mendapatkan bantuan internasional dan menjalin kerjasama di bidang kebencanaan.<sup>66</sup>

Bantuan internasional dilihat dari status bencana yang ditetapkan oleh negara, menekankan pada bantuan yang diharapkan oleh negara terdampak kepada negara lain. Biasanya bantuan yang datang berupa logistik, alat berat, hingga personil militer. Sementara bencana dalam perspektif kosmopolitanisme menekankan pada kesukarelaan masyarakat global untuk saling membantu satu sama lain. Artinya, negara terdampak tidak bergantung pada bantuan internasional, namun juga tidak menolak setiap bantuan internasional yang masuk. Biasanya bantuan yang datang berupa dana, makanan, pakaian, obat-obatan dan tim medis untuk kedaruratan.

---

<sup>66</sup> Ratih Herningtyas, Suwardono, *Diplomasi Bencana: Sejarah, Peluang dan Kerja Sama Internasional*. Hubungan Internasional UMY Hal. 25-26